



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A.	PERENCANAAN
-----------	--------------------

Perencanaan Kabupaten Sidoarjo diimplementasikan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015. RPJMD ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, baik Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat secara luas dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah dalam lima tahun sesuai dengan porsi dan peran masing-masing. Dengan demikian diharapkan semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015.

Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama dari seluruh stakeholder pembangunan, keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tergantung pada kesungguhan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

1	VISI DAN MISI
----------	----------------------

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang



dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015.

a. Visi

Visi merupakan panduan ke arah masa depan bagi suatu organisasi. Visi umumnya masih bersifat umum dan luas. Visi menjelaskan kemana organisasi akan berjalan dalam bentuk konseptual dan sangat umum. Akan tetapi, juga menyediakan arahan emosional. Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi.

Visi merupakan panduan ke arah masa depan bagi suatu organisasi. Visi umumnya masih bersifat umum dan luas. Visi menjelaskan kemana organisasi akan berjalan dalam bentuk konseptual dan sangat umum. Akan tetapi, juga menyediakan arahan emosional. Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi.

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah

”Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Madani”.

Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2011 – 2015 ini adalah :

“Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”

Selanjutnya, Visi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) **Sejahtera** adalah kondisi masyarakat yang mempunyai indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi. IPM disusun dari 3 komponen, yaitu : lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat



kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Dari kondisi ini, diharapkan, seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang meliputi pendapatan, kesehatan, pendidikan, keadaan sosial budaya, keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban telah sampai pada pencapaian taraf puncak baik lahir maupun batin.

b) **Mandiri** adalah kondisi masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus tergantung pada pihak luar. Pada tataran masyarakat, mandiri adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak. Sedangkan pada tataran pemerintah daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa harus tergantung dengan luar. Terdapat lima indikator bagi terwujudnya pemerintah daerah yang mandiri, yaitu:

1. Rasio PAD terhadap APBD ≥ 20 %, ini berarti pendapatan asli daerah (PAD) mampu membiayai pembangunan dan pemerintahan.
2. Rasio kemandirian keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman, dengan semakin kecil rasio ini menggambarkan semakin mandirinya daerah.
3. Optimalisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ini berarti Pemerintah daerah selalu berupaya mendorong pembangunan di sembilan sektor perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial sehingga kontribusinya pada perekonomian daerah bisa lebih nyata dirasakan.
4. Perimbangan perbandingan income perkapita dengan kebutuhan hidup masyarakat, ini berarti tiap-tiap penduduk/masyarakat dapat hidup secara layak akibat terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya dari pendapatan yang diperolehnya.
5. Surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), ini berarti pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh daerah harus relatif tinggi sehingga surplus bila digunakan untuk pembiayaan



pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah pembayaran terhadap hutang-hutang daerah.

- c) **Berkeadilan** adalah terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh partisipasi seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Serta diukur dengan indeks ketimpangan antar wilayah.

b. Misi

Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Perumusan misi dilakukan bersama oleh perwakilan dari: Dinas, Badan, Kantor, Instansi, dan DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal (kesempatan (Opportunity) dan ancaman (Threat)) dan kemampuan internal (kekuatan (Strong) dan kelemahan (Weakness)) Kabupaten Sidoarjo.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015 dijabarkan ke dalam 8 misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri.

Adapun 8 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang sejahtera harus dimulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global diarahkan pada pembangunan



sumber daya manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi.

Misi 2: Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi.

Misi 3: Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sidoarjo seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama.



Misi 4: Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.

Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal.

Misi 5: Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Misi 6: Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pemberdayaan investasi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di Kabupaten Sidoarjo adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Misi 7: Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan



lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Misi 8: Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.

Mengembangkan demokrasi, norma, dan etika masyarakat merupakan upaya menuju Kabupaten Sidoarjo yang demokratis, mandiri dan sejahtera. Perlu adanya upaya yang serius dan intens dari segenap aparatur daerah untuk mensosialisasikan cara-cara demokrasi yang ideal secara simultan dan berkelanjutan.

1. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN

Strategi merupakan pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.



a. Strategi

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015 merumuskan 8 strategi yang diharapkan akan mampu membawa kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan masyarakat.

Strategi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu bagian visi pemerintah dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan, dan pendapatan perkapita masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling berhubungan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Tidak hanya kemiskinan yang mempunyai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, namun sektor pendidikan serta kesehatan mempunyai peran yang sangat penting.

Dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, dalam menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar output-nya mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian



untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional, sehingga secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik dari yang normal maupun yang berkelainan, yang mampu maupun yang tidak mampu, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setidaknya sesuai anjuran pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun.

Di bidang kesehatan, upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat, baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga yang miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam menyikapi kesehatan, harus menjadi perhatian utama semua pihak khususnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Salah satu faktor penting juga yang mempengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah perhatian



masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan.

Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembangunan dan Puskesmas keliling, bisa merupakan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengoptimalkan pemanfaatnya. Meskipun fasilitas Puskesmas terdapat hampir di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan ini masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat yang sekiranya mempunyai beban dalam hal biaya berobat dan jarak tempuh transportasinya.

Berbagai sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo harus dibentuk agar dalam pelaksanaannya langsung mempunyai dampak terhadap masyarakat. Beberapa masukan dan saran mengenai sasaran pembangunan kesehatan di masyarakat Sidoarjo yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dengan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan serta perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa melalui posyandu dan puskesmas.



Strategi II : Pembangunan ekonomi sinergis dengan potensi daerah secara berkelanjutan meliputi industri, perdagangan, jasa, pertanian berbasis agrobis, meningkatkan daya saing usaha kecil menengah dan koperasi, serta pengembangan sektor pariwisata

Pembangunan di bidang industri menghadapi tantangan kedepannya. Berbagai hal seperti kesiapan pemerintah di bidang regulasi, serta permodalan merupakan hal yang dapat mendukung perkembangan investasi serta infrastruktur daerah. Kabupaten Sidoarjo terkenal dalam hal perikanan, sehingga sektor ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah agar hasil perikananannya terus optimal.

Pembangunan pertanian mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui peningkatan hasil produksi pertanian serta perikanan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan sektor pertanian dan perikanan diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, dan diharapkan bisa menjadi titik pusat sebagai sumber penggerak sektor lain dengan pengembangan agrobisnis terutama agroindustri juga mempunyai peluang/potensi pengembangan yang sangat besar, serta mempunyai kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja. Namun kedepannya pelatihan dan penanganan proses produksi serta informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna harus dioptimalkan, karena terjadi tren penurunan ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian. Beberapa masalah yang akan dihadapi juga seperti permasalahan kelangkaan pupuk pada saat masa tanam, serta rendahnya harga pada saat panen raya merupakan



permasalahan klasik yang perlu penanganan terpadu antar sektor. Sehingga kebutuhan pupuk dalam jumlah, jenis, lokasi dan waktu harus selalu terpantau dan pendistribusian secara tepat dapat terlaksana.

Pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis. Karena sektor tersebut memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta berbagai upaya dalam penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan UMKM yang merupakan bagian terbesar dari kegiatan ekonomi-sosial penduduk.

Dalam masa krisis, usaha skala Mikro, Kecil, dan Menengah telah memperlihatkan ketangguhannya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi kedepan diarahkan untuk lebih menguatkan keberpihakan pada pemberdayaan usaha ekonomi rakyat melalui pertumbuhan dan pengembangan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga keberadaan UMKM dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah.

Potensi industri kecil kerajinan yang strategis, telah dilakukan pembinaan dalam bentuk sentra industri dan “kampoeng” perlu terus dikembangkan. Kemampuan UKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UKM yang harus kondusif, yang mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar dan tingkat kewirausahaan. Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar dan kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat serta perubahan ekonomi global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan UKM untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UKM. Saat ini perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan kedua kondisi tersebut.



Oleh karena itu, upaya pemberdayaan UMKM menjadi tugas bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga mampu menjadi pilar utama ekonomi daerah yang tangguh yang mampu menggerakkan sektor riil, dan secara bertahap dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Strategi III : Meningkatkan modal sosial, kegiatan sosial dan ketertiban masyarakat

Konsisten dengan misi ketiga yang mengacu pada tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban, maka diperlukan sebuah langkah untuk mencapainya, yaitu dengan memperkuat modal sosial melalui kegiatan sosial masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat. Terciptanya ketertiban masyarakat ini menjadi syarat mutlak tumbuhnya investasi di suatu daerah, hal ini untuk menarik investor dari dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya. Penanaman modal investor di daerah tersebut akan membawa dampak positif pada tingkat perekonomian masyarakat sekitar.

Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal bahkan hingga terorisme.

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian perkembangan variasi gangguan kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan konflik antar masyarakat harus diantisipasi. Meskipun upaya-upaya menjaga ketentraman dan ketertiban telah mampu menciptakan iklim yang relatif kondusif, namun besarnya wilayah Kabupaten Sidoarjo, ketentraman dan penanggulangan kriminalitas masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi prioritas untuk diantisipasi dan



diselesaikan. Meningkatnya perilaku anarki dan pelanggaran hukum di masyarakat, kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas dan kenakalan remaja sebagai dampak dari masalah ekonomi maupun globalisasi informasi. Bila tidak dilakukan antisipasi secara dini akan berdampak pada penyelenggaraan perlindungan ketentraman masyarakat.

Strategi IV : Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam kondisi seperti itu, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu, pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan yang ditujukan pada kedudukan dan peranan perempuan diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, agar kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan. Sehingga mampu menjadi mitra sejajar laki-laki. Kebijakan ini dilakukan secara lintas bidang/program, lintas lembaga, dan lintas daerah. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan mengupayakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) pada kebijakan dan program pembangunan. Langkah ini dilakukan di setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Salah satu permasalahan pembangunan sosial dan budaya adalah masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di sebagian besar bidang kehidupan dan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan



gender. Ketimpangan gender ini diperburuk dengan masih banyaknya kebijakan dan program pembangunan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang belum responsif sehingga perempuan yang paling banyak menanggung berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, lemahnya sistem perlindungan tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri dan di sektor informal lainnya, serta tindak kekerasan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional tampaknya belum mampu menumbuhkan komitmen dan memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan pola pikir para pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Adanya permasalahan dan hambatan yang cukup besar dalam mengimplementasikan PUG dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo antara lain mengenai pemahaman kesetaraan dan keadilan gender di kalangan pengambil kebijakan dan pelaksana program. Selain itu juga belum kuatnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya PUG. Sehingga PUG belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena dalam perspektif jangka pendek kurang berperan secara langsung dalam peningkatan pendapatan daerah.

Peran serta dari masyarakat menjadi pondasi utama dalam pembangunan suatu daerah. Diiringi dengan inovasi yang muncul dari masyarakat, diharapkan, masyarakat memiliki andil dalam pembangunan. Inovasi-inovasi masyarakat akan sangat membantu pemerintahan dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang berbasis masyarakat. Sebagaimana diuraikan pada penjelasan sebelumnya, keadilan gender menjadi target dalam pembangunan, yaitu dengan meningkatkan persentase gender wanita dalam struktur pemerintahan.

Ada beberapa saran mengenai sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan dalam rangka peningkatan kualitas



kehidupan dan peran perempuan adalah peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan peran perempuan.

Dalam kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya patriarki) dan bersifat struktural (dimapankan oleh tatanan sosial politik yang ada), diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi V : Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur

Desentralisasi dan otonomi daerah memiliki dampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sementara dampak terhadap birokrasi adalah harapan atas penyediaan pelayanan publik akan menjadi lebih sederhana dan cepat serta lebih baik. Sejalan dengan misi kelima tentang peningkatan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima, mendorong setiap aparatur untuk berbenah diri dan berusaha untuk memaksimalkan kemampuannya dalam melayani masyarakat. Pelayanan masyarakat menjadi sangat penting dalam pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan terlebih dahulu meningkatkan profesionalisme aparatur. Akuntabilitas dan transparansi aparatur menjadi sorotan utama masyarakat. Tuntutan masyarakat menjadi tantangan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi aparatur pemerintahan.

Pemerintah sebagai *public service* harus mewujudkan tugas pelayanan dalam kinerja pemerintah daerah. Masyarakat yang dilayani harus



merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hatinurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan (transparansi), efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Untuk mengimplementasikan pelayanan prima harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas aparatur yang berhubungan dengan upaya memberikan *public service excellence* kepada masyarakat. Sehingga capaian yang diinginkan adalah terbentuknya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi VI : Meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur daerah dan pengembangan iklim investasi

Di sektor jasa, dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang sangat pesat perkembangannya. Hal ini tidak lepas dari peran sektor perdagangan barang dan jasa. Sektor jasa akan berkembang, apabila kota tersebut mempunyai tingkat perdagangan yang cukup ramai. Contohnya seperti jasa telekomunikasi, jasa kurir antar barang, dan lain sebagainya sebagai wujud terciptanya perdagangan yang maju.



Sektor industri juga masih cukup besar kontribusinya terhadap PDRB, sehingga perlu tetap didukung untuk pengembangan investasinya. Namun diarahkan pada industri yang mendukung konsep Agropolitan.

Dengan keadaan yang maju tersebut, diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan investasi dan perdagangan lokal, regional, dan internasional ditunjukkan dalam besarnya angka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta besarnya Penanaman Modal Asing. Kenaikan atau penurunan jumlah investasi harus dilihat secara rinci. Apakah terdapat kenaikan/penurunan investor yang menanamkan modalnya, atau hanya sebatas perluasan industri lokal saja. Terlebih nilai investasi di sektor industri, dimana baik secara langsung maupun tak langsung mempunyai dampak terhadap terwujudnya sasaran pembangunan peningkatan investasi, peningkatan bidang ketenagakerjaan dan produktivitas, serta bidang ekonomi daerah lainnya yang dapat menunjang sektor infrastruktur daerah.

Apabila peran pemerintah serta peran sektor swasta dapat memberikan sumbangsih yang layak terhadap penerimaan Kabupaten, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi, dan langkah selanjutnya adalah pemerataan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa poin penting mengenai pemerataan infrastuktur adalah pemerataan jalan beraspal, lampu penerangan jalan, pemerataan jalur komunikasi telepon, dan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal.

Sehingga bisa diraih sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan perdagangan serta pembangunan infrastruktur daerah yang kondusif dan terciptanya pemerataan investasi secara bertahap sesuai potensi daerah. Sehingga peranan investasi terhadap PDRB lebih meningkat agar dapat memicu pertumbuhan perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.



Strategi VII : Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

Kabupaten Sidoarjo mengalami bencana letusan lumpur (*mud volcano*) akibat kegagalan proyek penambangan gas yang dilakukan oleh pihak swasta. Hal ini bisa kita lihat dampak negatif yang ditimbulkan yaitu lumpur yang keluar ke permukaan tersebut merendam perkampungan warga, bahkan beberapa desa hilang dari peta karena lumpur telah menenggelamkan perumahan di beberapa desa. Selain berdampak dalam hilangnya rumah-rumah warga, ternyata dampak negatif muncul dalam hal pengairan air sungai. Sungai yang pada awalnya layak untuk digunakan warga mengairi sawah maupun kegiatan sehari-hari, kondisi saat ini bisa dikatakan sangat tidak layak. Karena beberapa sungai utama seperti Sungai Brantas terdapat endapan lumpur yang berasal dari bencana di atas..

Untuk bencana lumpur Lapindo, penanganan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (BPLS). Peran Kabupaten Sidoarjo adalah memfasilitasi dan melakukan mediasi permasalahan sosial yang dialami warga kepada Pemerintah Pusat. Untuk masalah infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengusulkan ke pemerintah pusat untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak di sekitar lokasi semburan lumpur Lapindo dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kegiatan-kegiatan lain yang diluar kewenangan Pemerintah Pusat sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak melalui suatu program khusus dengan nomenklatur penanganan Lapindo, tetapi tersebar melalui beberapa kegiatan yang merupakan turunan program kerja yang dimiliki oleh SKPD.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah tidak hanya sebatas pada penanganan bencana serta pemulihan lingkungannya, namun juga beberapa aspek permasalahan yang potensial terjadi di masyarakat. Beberapa diantaranya adalah kebutuhan air bersih, pengelolaan dan pengoptimalisasi sumber daya alam, dan yang tidak kalah pentingnya



yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian alam dan penegakan hukum di bidang lingkungan.

Beberapa masyarakat yang jauh dari sistem saluran air bersih, masih memanfaatkan air sumur tanah. Walaupun bisa dikatakan sudah dapat tercukupinya kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari, namun muncul permasalahan yang pelik jika datangnya musim kemarau. Air sumur dan air sungai akan mengering akibat musim kemarau. Sehingga menyebabkan krisis air bersih di masyarakat yang belum dilalui sistem air bersih kota. Hal ini merupakan permasalahan utama dalam pemerataan penyediaan air bersih untuk masyarakat Sidoarjo.

Tak hanya kemarau, musim hujan pun juga mendatangkan masalah yang sama. Jawa Timur yang akhir-akhir ini sering dilanda hujan deras, terutama kota Sidoarjo dan beberapa kota lainnya, menyebabkan masalah banjir. Hal ini dapat mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Penyebabnya bisa mulai dari sampah yang menghambat saluran air kota, maupun penanganan air banjir yang kurang optimal.

Beberapa permasalahan yang terlihat maupun yang tak terlihat, harus mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan beberapa langkah harus segera dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Strategi VIII : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik dan pengembangan iklim demokrasi yang sehat

Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal.

Untuk itu perlunya dibentuk beberapa langkah yang dianggap dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik. Nilai-nilai



persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan hal dasar yang harus dibangun di dalam kehidupan politik bermasyarakat. Seperti Pemilu Kepala Daerah atau Pemilukada, dimana tingkat partisipasi masyarakat harus tinggi dan seminim mungkin tidak ada yang golput.

Pelaksanaan demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kokoh. Sampai saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat dikatakan telah berjalan pada jalur dan arah yang benar, yaitu ditunjukkan oleh terlaksananya PILKADA Langsung. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bidang politik hanya bersifat membantu membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik. Hasil pelaksanaan pembinaan politik kepada masyarakat ditunjukkan dengan kegiatan forum wawasan kebangsaan.

Secara umum dapat dikatakan, masyarakat tampak makin sensitif terhadap berbagai gejala dan proses politik yang terjadi, serta ingin lebih banyak turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang langsung berkaitan dengan politik kepentingan golongan. Kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah model awal yang baik bagi demokratisasi. Teladan, pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan Pers merupakan hal yang akan terus dilakukan bagi peningkatan kualitas dan keikutsertaan (partisipasi) politik dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam jiwa setiap individu masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan pembangunan politik ditandai dengan semakin meningkatnya arus demokratisasi telah membawa implikasi pada berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti dinamika perubahan politik yang dinamis sehingga menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran lembaga legislatif sebagai wahan representasi politik masyarakat, adanya kecenderungan menurunnya partisipasi politik masyarakat.

Dari beberapa langkah yang ada, diharapkan dapat terlaksananya peran dan kelembagaan yang lebih kokoh melalui peran dan fungsi lembaga

politik, kemasyarakatan, pers, dan pemerintahan dengan meningkatkan hubungan yang harmonis antara DPRD, Parpol, LSM, dan Masyarakat. Serta yang terpenting bahwa partisipasi masyarakat harus meningkat dalam proses pengambilan keputusan dalam berpolitik. Seperti pemilihan kepala daerah, maupun keputusan kebijakan publik melalui forum publik.

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel II.1

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sidoarjo

VISI			
“Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”			
MISI I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM masyarakat Sidoarjo	1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 2) Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat	1) Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat 2) Peningkatan tingkat Kesehatan masyarakat 3) Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat



	<p>3) Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>4) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera</p> <p>5) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat</p> <p>6) Meningkatnya Minat Baca bagi Masyarakat utamanya bagi para pelajar</p> <p>7) Meningkatnya pelayanan Ketransmigrasian</p>		<p>4) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk</p> <p>5) Peningkatan daya saing sumber daya manusia</p>
<p>MISI II : Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
Meningkatnya Daya Saing Daerah	<p>1) Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan Koperasi</p> <p>2) Meningkatnya Ketahanan Pangan</p>	<p>Pembangunan ekonomi sinergis dengan potensi daerah secara berkelanjutan meliputi industri, perdagangan, jasa,</p>	<p>1) Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat</p> <p>2) Peningkatan tingkat Kesehatan masyarakat</p> <p>3) Peningkatan tingkat</p>



	<p>Daerah (utama)</p> <p>3) Meningkatnya Produksi Perikanan</p> <p>4) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian</p> <p>5) Meningkatnya Kunjungan Wisata</p> <p>6) Meningkatnya produksi sektor industri</p> <p>7) Meningkatnya Volume Perdagangan</p>	<p>pertanian berbasis agribis, meningkatkan daya saing usaha kecil menengah dan koperasi, serta pengembangan sector pariwisata</p>	<p>kesejahteraan masyarakat</p> <p>4) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk</p> <p>5) Peningkatan daya saing sumber daya manusia</p>
<p>MISI III : Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
<p>Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian dan beriman</p>	<p>1) Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian dengan pemberdayaan pemuda dan olahraga</p> <p>2) Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian melalui pelestarian kebudayaan lokal</p>	<p>Meningkatkan modal sosial, kegiatan sosial dan ketertiban masyarakat</p>	<p>1) Peningkatan modal sosial pembangunan (kepribadian dan pelestarian budaya lokal</p> <p>2) Peningkatan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum secara konsisten dan berkelanjutan</p>



MISI IV : Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.	1) Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek 2) Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender	1) Peningkatan pemerataan pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan desa 2) Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan
MISI V : Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
Meningkatnya transparansi, profesionalisme, dan produktivitas aparatur	1) Meningkatkan pelayanan kependudukan 2) Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 3) Meningkatkan Pengembangan budaya pemerintah yang bersih, akuntabel,	Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta profesionalisme aparatur	1) Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi 2) Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. 3) Pengembangan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi 4) Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan



	<p>transparan, dan bebas dari korupsi</p> <p>4) Tersedianya dokumen statistik</p> <p>5) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata</p> <p>6) Tersusunnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, inovatif memperhatikan kepentingan masyarakat</p>		<p>pemerintahan.</p> <p>5) Peningkatan produktivitas aparatur</p> <p>6) Pengembangan sistem tatakelola kearsipan</p> <p>7) Peningkatan public service excellence</p>
MISI VI : Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
Meningkatnya Investasi Daerah yang didukung dengan layanan perijinan cepat dan pengembangan Infrastruktur Daerah secara lebih memadai	<p>1) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum</p> <p>2) Meningkatkan kualitas layanan kebutuhan dasar (perumahan) masyarakat</p>	Meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur daerah dan pengembangan iklim investasi	<p>1) Pengembangan investasi berdaya dukung tinggi</p> <p>2) Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah bidang/urusan Pekerjaan Umum</p> <p>3) Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah bidang/urusan Perhubungan</p> <p>4) Optimalisasi</p>



	3) Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN 4) Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal 5) Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kota 6) Meningkatnya Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah		pembangunan infrastruktur daerah bidang/urusan Perumahan/Permukiman
MISI VII : Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup	1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan 2) Tersedianya energy alternative yang dimanfaatkan	Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	1) Optimalisasi pelestarian dan kualitas lingkungan hidup



MISI VIII : Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam berpolitik	1) Meningkatnya kualitas norma maupun etika dalam masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpolitik dan pengembangan iklim demokrasi yang sehat	1) Peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik

c. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan 8 misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- 1) Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM masyarakat Sidoarjo
- 2) Meningkatnya Daya Saing Daerah
- 3) Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian dan beriman
- 4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.
- 5) Meningkatnya transparansi, profesionalisme, dan produktivitas aparatur
- 6) Meningkatnya Investasi Daerah yang didukung dengan layanan perijinan cepat dan pengembangan Infrastruktur Daerah secara lebih memadai
- 7) Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup
- 8) Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam berpolitik



2. Sasaran

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
- 2) Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat
- 3) Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera
- 5) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
- 6) Meningkatnya Minat Baca bagi Masyarakat utamanya bagi para pelajar
- 7) Meningkatnya pelayanan Ketransmigrasian
- 8) Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan Koperasi
- 9) Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (utama)
- 10) Meningkatnya Produksi Perikanan
- 11) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian
- 12) Meningkatnya Kunjungan Wisata
- 13) Meningkatnya produksi sektor industri
- 14) Meningkatnya Volume Perdagangan
- 15) Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian dengan pemberdayaan pemuda dan olahraga
- 16) Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian melalui pelestarian kebudayaan lokal
- 17) Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek
- 18) Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan
- 19) Meningkatnya pelayanan kependudukan
- 20) Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat
- 21) Meningkatnya Pengembangan budaya pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi
- 22) Tersedianya dokumen statistik
- 23) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata



- 24) Tersusunnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, inovatif memperhatikan kepentingan masyarakat
- 25) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum
- 26) Meningkatnya kualitas layanan kebutuhan dasar (perumahan) masyarakat
- 27) Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN
- 28) Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal
- 29) Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kota
- 30) Meningkatnya Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah
- 31) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan
- 32) Tersedianya energy alternative yang dimanfaatkan
- 33) Meningkatnya kualitas norma maupun etika dalam masyarakat.

d. Target Kinerja Sasaran

Sasaran (*objective*) pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1) Sasaran "*Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat*", yang dilaksanakan melalui urusan Pendidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Pendidikan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Ratio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan
4	Prosentase Angka Putus Sekolah	Dinas Pendidikan
5	Prosentase Nilai Rata-Rata US dan UN	Dinas Pendidikan
6	Angka Melek Huruf	Dinas Pendidikan



Urusan : Pendidikan		
No	INDIKATOR	SKPD
7	Prosentase Angka Kelulusan Sekolah	Dinas Pendidikan
8	Rasio Ideal Prasarana & Sarana Pendidikan Terhadap Jumlah Murid : b. Rasio Jumlah Guru Terhadap jumlah murid c. Rasio Jumlah kelas terhadap murid d. Kondisi bangunan sekolah	Dinas Pendidikan

- 2) Sasaran “*Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat*”, yang dilaksanakan melalui urusan Kesehatan dengan indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

Urusan : Kesehatan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan
2	Angka kematian anak balita	Dinas Kesehatan
3	Angka kematian ibu	Dinas Kesehatan
4	Angka morbiditas : a. Angka kesembuhan TB Paru b. Angka kesakitan DBD c. Angka penemuan AFP (Acute Flaccid Paralysis = Lumpuh Layu Mendadak)	Dinas Kesehatan
5	Balita dengan gizi buruk	Dinas Kesehatan
6	Prevalensi gizi kurang	Dinas Kesehatan
7	Kecamatan bebas rawan gizi	Dinas Kesehatan
8	Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas: a. Persentase kunjungan rawat jalan b. Persentase kunjungan rawat inap	Dinas Kesehatan
9	Ratio penduduk yang memanfaatkan RSUD Kabupaten Sidoarjo : a. Jumlah kunjungan rawat inap b. Jumlah kunjungan rawat jalan c. Bed Occupancy Ratio (BOR) d. Average Length of Stay (ALOS) e. Turn Over Interval (TOI) f. Net Death Rate (NDR)	RSUD

- 3) Sasaran “*Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja*” dilaksanakan melalui urusan Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :



Urusan: Ketenagakerjaan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
3	Jumlah perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
4	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
5	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
6	Jumlah perusahaan yang ada	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
7	Angka kecelakaan kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
8	Jumlah penindakan kasus pelanggaran ketenagakerjaan	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

- 4) Sasaran “*Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera*” dilaksanakan melalui urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Tingkat Prevalensi peserta KB Aktif	BPMPKB
2	Prosentase Perkawinan dibawah umur	BPMPKB
3	Rata-rata usia kawin pertama penduduk perempuan	BPMPKB
4	Total Fertility Rate	BPMPKB

- 5) Sasaran “*Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat*”, dilaksanakan melalui urusan Sosial, dengan indikator sebagai berikut :

Urusan : Sosial		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
2	Persentase jumlah penanganan PMKS	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
3	Penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin	Bag. Adm. Kesra & Kemasyarakatan
4	Jumlah rumah ibadan yang dibantu	Bag. Adm. Kesra & Kemasyarakatan
5	Jumlah badan kredit desa	Bag. Adm. Perekonomian & SDA



- 6) Sasaran “*Meningkatnya Minat Baca bagi Masyarakat utamanya bagi para pelajar*”, dilaksanakan melalui urusan Perpustakaan, dengan indikator sebagai berikut :

Urusan : Perpustakaan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Pengunjung Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip
2	Penambahan Jumlah Buku perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip
3	Penambahan Judul Buku perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip
4	Jumlah peminjam	Kantor Perpustakaan dan Arsip
5	Jumlah perpustakaan keliling	Kantor Perpustakaan dan Arsip

- 7) Sasaran “*Meningkatnya pelayanan Ketrasmigrasian*”, dilaksanakan melalui urusan Transmigrasi, dengan indikator sebagai berikut :

Urusan : Transmigrasi		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah transmigran (KK/jiwa) yang diberangkatkan	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

- 8) Sasaran “*Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan koperasi*” dilaksanakan melalui urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil menengah		
No	Indikator	SKPD
1	Persentase koperasi aktif	Diskoperindag dan ESDM
2	Jumlah KSP/USP sehat	Diskoperindag dan ESDM
3	Jumlah modal koperasi	Diskoperindag dan ESDM
4	Jumlah volume usaha koperasi	Diskoperindag dan ESDM
5	Jumlah sisa hasil usaha (SHU) koperasi	Diskoperindag dan ESDM
6	Jumlah usaha mikro	Diskoperindag dan ESDM



Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil menengah		
No	Indikator	SKPD
7	Jumlah usaha kecil	Diskoperindag dan ESDM
8	Jumlah usaha menengah	Diskoperindag dan ESDM
9	Jumlah modal UMKM	Diskoperindag dan ESDM
10	Jumlah volume usaha UMKM	Diskoperindag dan ESDM
11	Jumlah bantuan pemerintah pada koperasi	Diskoperindag dan ESDM

- 9) Sasaran “*Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah*”, dilaksanakan melalui urusan Ketahanan Pangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Ketahanan Pangan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Pola pangan harapan	Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan
2	Ketersediaan pangan daerah	Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan

- 10) Sasaran “*Meningkatnya produksi perikanan*”, yang dilaksanakan melalui urusan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Kelautan dan Perikanan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Produksi Perikanan : laut, perairan umum, kolam dan tambak	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Tingkat produktivitas: udang windu dan bandeng	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan



- 11) Sasaran “*Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian*”, yang dilaksanakan melalui urusan Pertanian, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Pertanian		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura berupa padi, jagung, kacang hijau, kedelai, sawi, bayam dan kangkung	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2	Produksi perkebunan tebu	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	Produktivitas perkebunan tebu	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
4	Produksi peternakan : 1. Daging 2. Telur (ton) 3. Susu (liter)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
5	Populasi binatang ternak (kuda, sapi, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, enthok)	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

- 12) Sasaran “*Meningkatnya kunjungan wisatawan*”, yang dilaksanakan melalui urusan Pariwisata, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Pariwisata		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah kunjungan wisata	Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2	Jumlah pengelola jasa wisata	Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

- 13) Sasaran “*Meningkatnya produksi sektor industri*”, yang dilaksanakan melalui urusan Industri, dengan indikator kinerja sebagai berikut :



Urusan : Industri		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Peningkatan Jumlah industri	Diskoperindag dan ESDM
2	Peningkatan Jumlah industri yang memiliki izin	Diskoperindag dan ESDM
3	Peningkatan Volume (Nilai produksi) industri	Diskoperindag dan ESDM
4	Jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor industri	Diskoperindag dan ESDM
5	Jumlah sentra industri/klaster	Diskoperindag dan ESDM

- 14) Sasaran "*Meningkatnya volume perdagangan*", yang dilaksanakan melalui urusan Perdagangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Perdagangan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	volume perdagangan	Diskoperindag dan ESDM
2	Jumlah pelaku usaha perdagangan	Diskoperindag dan ESDM
3	Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan	Diskoperindag dan ESDM
4	Nilai ekspor daerah	Diskoperindag dan ESDM
5	Persentase pedagang yang menempati Pasar	Dinas Pasar

- 15) Sasaran "*Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian dengan pemberdayaan pemuda dan olahraga*" dilaksanakan melalui urusan Pemuda dan Olahraga, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Urusan: Pemuda dan Olahraga		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat Nasional	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2	Jumlah sarana olahraga milik pemerintah	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3	Jumlah Grup Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata



Urusan: Pemuda dan Olahraga		
No	INDIKATOR	SKPD
4	Jumlah pemuda pelopor	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

- 16) Sasaran "*Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian melalui pelestarian kebudayaan loka*" dilaksanakan melalui urusan Kebudayaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Urusan : Kebudayaan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2	Jumlah desa yang melestarikan budaya nelayan pesisir	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

- 17) Sasaran "*Terwujudnya Kesetaraan Gender di berbagai aspek*" dilaksanakan melalui urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan advokasi	BPMPKB
2	GEM (<i>Gender Empowerment Measurement</i>)	BPMPKB
3	GDI (<i>Gender Development Indeks</i>)	BPMPKB

- 18) Sasaran "*Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan*" dilaksanakan melalui urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan	BPMPKB
2	Jumlah Rehabilitasi / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH)	BPMPKB



- 19) Sasaran “*Meningkatnya pelayanan kependudukan*”, dilaksanakan melalui urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Persentase penduduk ber KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase penduduk ber Akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Jumlah Pelayanan Akta Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 20) Sasaran “*Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat*”, dilaksanakan melalui urusan Komunikasi dan Informatika, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan: Komunikasi dan Informasi		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah media informasi	Bagian Humas dan Protokol
2	Jumlah media komunikasi	Bagian Humas dan Protokol

- 21) Sasaran “*Meningkatnya Pengembangan budaya pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi*”, dilaksanakan melalui urusan Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

URUSAN: OTODA		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Realisasi PAD	DPPKA
2	Pendapatan daerah	DPPKA
3	Jumlah belanja daerah	DPPKA
4	Opini BPK atas laporan keuangan	DPPKA
5	Jumlah temuan/nilai pemeriksaan BPK dan tindaklanjutnya	Inspektorat



URUSAN: OTODA		
No	INDIKATOR	SKPD
6	Jumlah temuan/nilai pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan tindaklanjutnya	Inspektorat
7	Jumlah pelanggaran disiplin	Badan Kepegawaian Daerah
8	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dimiliki	Bagian Organisasi
9	Penyusunan dan Pengiriman LKPJ, LAKIP dan LPPD tepat waktu	Bagian Administrasi Pembangunan
10	Indeks kepuasan masyarakat	Bagian Organisasi
11	Persentase Jabatan Struktural Yang Terisi	Badan Kepegawaian Daerah
12	Persentase Pejabat Stuktural Yang Telah Mengikuti Diklatpim Sesuai Jenjangnya	Badan Kepegawaian Daerah
13	Jumlah Pelatihan Teknis dan Fungsional Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah
14	Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan	DPPKA
16	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Bagian Hukum
17	Jumlah permasalahan yang diselesaikan	Bagian Hukum

- 22) Sasaran "*Tersedianya dokumen statistik*", dilaksanakan melalui urusan Perencanaan Pembangunan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan: Perencanaan Pembangunan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	Bappeda

- 23) Sasaran "*Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata*", yang dilaksanakan melalui urusan Kearsipan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Kearsipan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku	Kantor Perpustakaan dan Arsip
2	Jumlah arsip in aktif yang dikelola	Kantor Perpustakaan dan Arsip



- 24) Sasaran “*Tersusunnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, inovative memperhatikan kepentingan masyarakat*”, yang dilaksanakan melalui urusan Perencanaan Pembangunan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

URUSAN: Perencanaan Pembangunan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen penelitian yang dihasilkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Pemanfaatan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penelitian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 25) Sasaran “*Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum*”, yang dilaksanakan melalui urusan Pekerjaan Umum, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan: Pekerjaan Umum.		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Kondisi Jalan dan Jembatan	Dinas PU Bina Marga
2	Ketersediaan PJU bagi masyarakat	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3	Luas daerah genangan	Dinas PU Pengairan
4	Luas areal dengan irigasi teknis	Dinas PU Pengairan

- 26) Sasaran “*Meningkatnya kualitas layanan kebutuhan dasar (perumahan) masyarakat*”, yang dilaksanakan melalui urusan Perumahan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Perumahan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah sarana air bersih yang dibangun	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Jalan lingkungan yang telah terbangun	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Tanggap Waktu (Response Time) kejadian kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



- 27) Sasaran “*Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN*”, yang dilaksanakan melalui urusan Penanaman Modal, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Penanaman Modal		
1	Jumlah Investasi PMA di Daerah	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
2	Jumlah Investasi PMDN Fasilitas di Daerah	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
3	Jumlah Investasi PMDN Non Fasilitas Daerah	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

- 28) Sasaran “*Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal*”, dilaksanakan melalui urusan Penanaman Modal dan Pertanahan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Penanaman Modal		
NO	INDIKATOR	SKPD
1	Persentase Penerbitan Ijin Tepat Waktu	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
2	Persentase Perusahaan yang Memiliki Ijin	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

- 29) Sasaran “*Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kota*” yang dilaksanakan melalui urusan Tata Ruang, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan Tata Ruang		
NO	INDIKATOR	SKPD
1	Dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL / Urban Desain)	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Jumlah Bangunan Ber IMB	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

- 30) Sasaran “*Meningkatnya Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah*”, dilaksanakan melalui urusan Perhubungan dengan indikator kinerja sebagai berikut :



Urusan: Perhubungan		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Peningkatan Jumlah Uji KIR	Dinas Perhubungan
2	Jumlah sarana dan prasarana transportasi	Dinas Perhubungan
3	Perkembangan perpanjangan ijin trayek angkutan pedesaan	Dinas Perhubungan
4	Terwujudnya Sistem Transportasi yang handal	Dinas Perhubungan
5	Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan

- 31) Sasaran *“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan”* yang dilaksanakan melalui urusan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan Lingkungan Hidup		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Pemenuhan baku mutu air sungai	Badan Lingkungan Hidup
2	Pemenuhan baku mutu air limbah :	Badan Lingkungan Hidup
	Pemenuhan baku mutu air limbah domestik	
	Pemenuhan baku mutu air limbah industri besar	
3	Pemenuhan baku mutu udara :	Badan Lingkungan Hidup
	Pemenuhan baku mutu udara di lokasi yang padat lalu lintas	
	Pemenuhan baku mutu udara di lokasi industri yang berpotensi pencemaran udara	
4	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
5	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- 32) Sasaran *“Tersedianya energy alternative yang dimanfaatkan”*, dilaksanakan melalui urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral		
No	INDIKATOR	SKPD
1	<i>Energy alternative</i> yang tersedia	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM



- 33) Sasaran “*Meningkatnya kualitas norma maupun etika dalam masyarakat*”, dilaksanakan melalui Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
No	INDIKATOR	SKPD
1	Jumlah pelanggaran masyarakat terhadap perda	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Jumlah Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Jumlah kegiatan pembinaan politik kepada masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

B.	PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
-----------	-------------------------------------

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain, adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyusun penetapan kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi



yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2014 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2014.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 dijadikan sebagai acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 dan melaporkannya dalam LAKIP.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.